



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

**Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2025**



KATA PENGANTAR

P uji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Januari hingga Maret 2025. Laporan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja di triwulan berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran serta pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama Triwulan IV, serta menjadi dasar yang bermanfaat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 6 Februari 2026



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos
Pangkat: Pembina TK.I
NIP. 198001122006041016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A... GAMBARAN UMUM	1
1....Perangkat Daerah	1
2. Sumber Daya Aparatur	22
3....Sumber daya Sarana Prasarana	25
B... ISU STRATEGIS	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ..	37
B... REALISASI ANGGARAN.....	52
BAB IV PENUTUP	57
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan karsipan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, DPK dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan dibidang perpustakaan;
2. Menyelenggarakan kegiatan dibidang karsipan;
3. Menyelenggarakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
4. Menyelenggarakan administrasi dinas.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan karsipan terdiri dari :

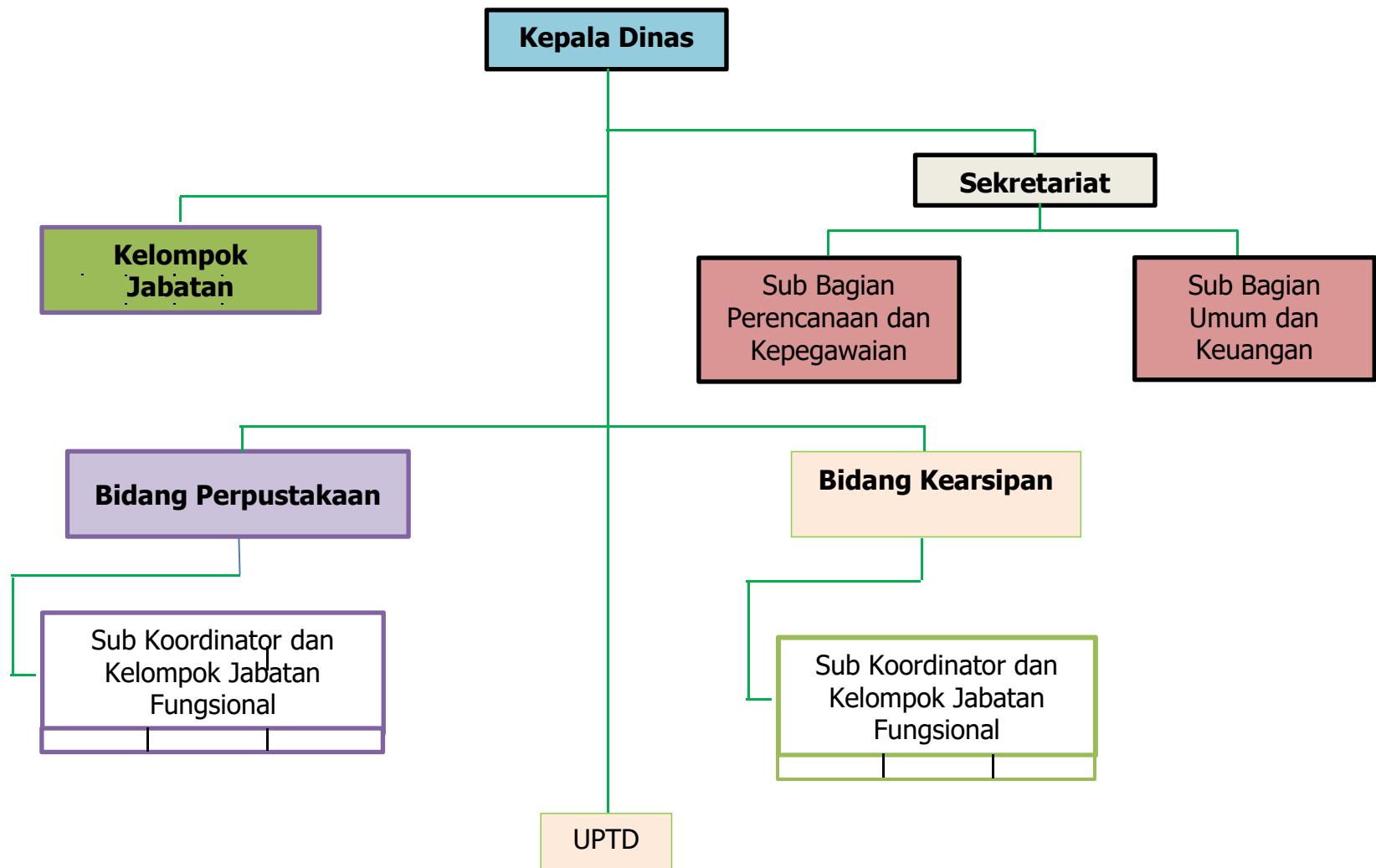
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Perpustakaan
- d. Bidang Karsipan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Luwu Timur, susunan Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

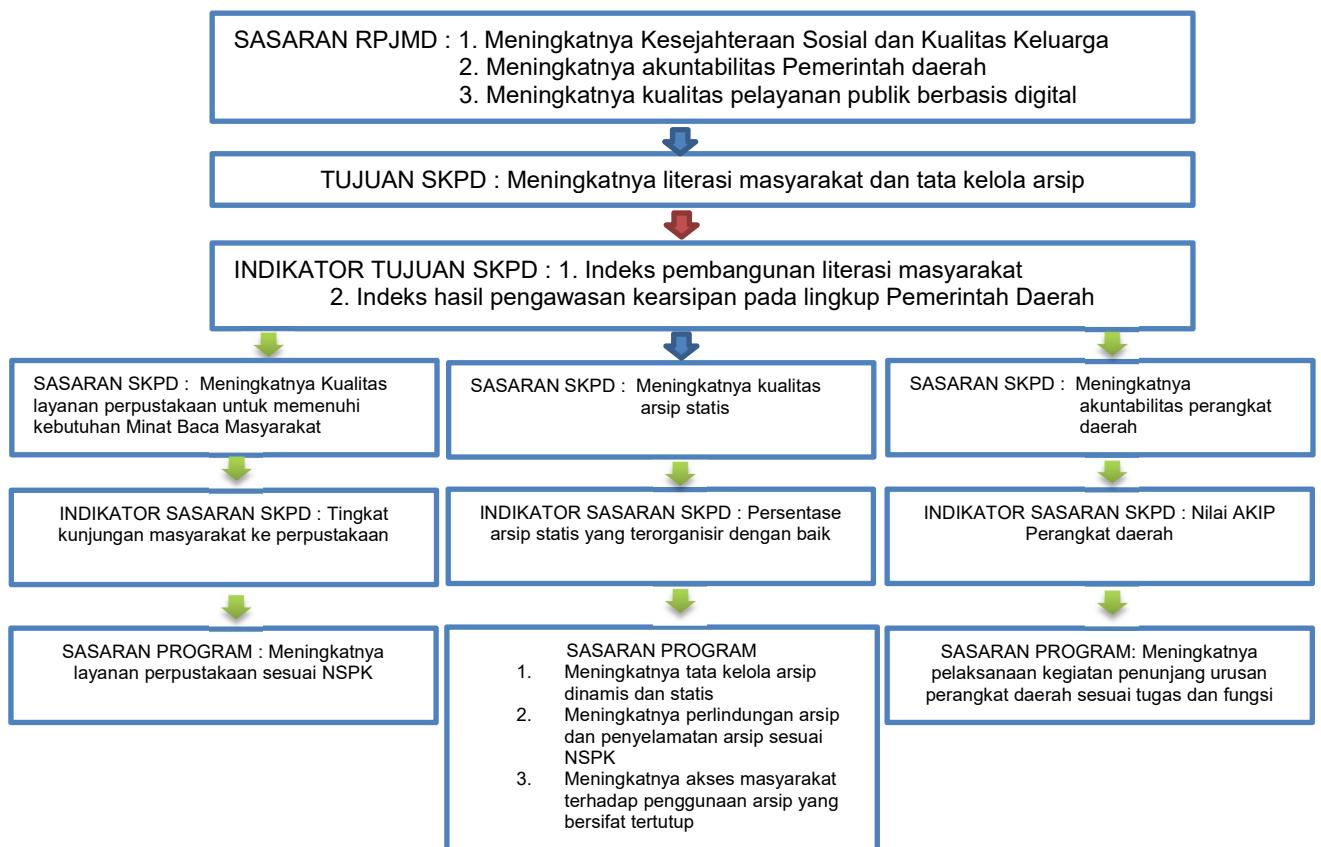


Untuk meningkatkan keselarasan antara tujuan organisasi dengan kinerja individu serta perencanaan strategi, program, atau kegiatan, diperlukan proses penyusunan model atau kerangka logis yang tepat. Pedoman ini bertujuan untuk membantu instansi pemerintah dalam mengembangkan model pemikiran logis yang mampu menerjemahkan kinerja organisasi menjadi kinerja individu, sekaligus merancang strategi, program, atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Untuk menjaga hubungan logis sebab-akibat antara berbagai kondisi yang dibutuhkan organisasi guna mencapai outcome yang diinginkan, diperlukan penggunaan pohon kinerja. Melalui pohon kinerja, diharapkan instansi pemerintah mampu memahami alur logika yang membantu dalam merumuskan strategi serta menemukan alternatif solusi untuk mencapai kinerja yang optimal.

Fungsi utama pohon kinerja adalah mengidentifikasi alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan organisasi. Agar solusi yang dihasilkan tepat, penyusunan pohon kinerja harus didasarkan pada kondisi faktual di lapangan serta berlandaskan bukti dan informasi yang andal. Adapun pohon kinerja yang diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Pohon Kinerja DPK



DPK telah menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan outcome pemerintah kabupaten Luwu Timur dan diturunkan hingga level operasional dengan prinsip logis, empiris dan holistik. Adapun pohon kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran RPJMD : 1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Keluarga; 2. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah daerah; 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Untuk mencapai sasaran ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) berkomitmen untuk meningkatkan Kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Minat Baca Masyarakat, dan Meningkatkan kualitas arsip statis. Hal ini penting untuk menjamin meningkatnya literasi masyarakat di Luwu Timur dan meningkatnya pengelolaan arsip statis di LKD.

- b. Tujuan SKPD : Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip

Untuk meningkatnya tujuan ini, indikator utama yang digunakan adalah 1. Indeks pembangunan literasi masyarakat, 2. Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah. Indikator ke-1 (satu) untuk mengevaluasi keterlibatan masyarakat dan upaya pemerintah daerah dalam membangun budaya literasi, terutama melalui perpustakaan, sedangkan indikator ke-2 (dua) peningkatan kualitas yang berfokus pada digitalisasi arsip dan implementasi aplikasi SRIKANDI.

- c. Sasaran Program SKPD : Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai NSPK

Merujuk pada perbaikan kualitas operasional, sarana, prasarana, dan koleksi perpustakaan agar memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). Tujuan utamanya adalah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan relevan, yang pada akhirnya meningkatkan indeks kegemaran membaca dan literasi masyarakat. Untuk memenuhi standar nasional, DPK sudah melakukan upaya-upaya dengan melakukan inovasi layanan, pengadaan buku/penambahan koleksi bacaan dan penambahan sarana-prasarana yang dibutuhkan.

- d. Sasaran Program SKPD : Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan arsip statis

Pengelolaan arsip dinamis di fokuskan pada penciptaan, penggunaan, dan penyusutan aktif pada perangkat daerah. Sementara arsip statis lebih kepada peningkatan mutu dalam pengelolaan, pelestarian, dan kemudahan akses terhadap arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan. Hal ini dicapai melalui pembaruan sistem pengelolaan, teknologi, serta pemeliharaan yang lebih terstandar, sehingga arsip sebagai memori kolektif bangsa dapat terjamin kelestariannya dan mudah ditemukan kembali. Untuk penunjang dibutuhkan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ini.

e. Meningkatnya perlindungan arsip dan penyelamatan arsip sesuai NSPK

Sasaran ini lebih pada upaya menjaga fisik dan informasi arsip dari ancaman kerusakan, kehilangan maupun dari bencana sesuai peraturan ANRI.

f. Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup

Sasaran ini bersifat teknis, tidak mudah diakses namun ada beberapa faktor atau kebijakan sehingga masyarakat bisa mengakses arsip yang bersifat tertutup ini. Arsip statis yang tertutup dapat diakses oleh masyarakat jika digunakan untuk kepentingan **penelitian**, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kepentingan **penyelidikan** dan **penyidikan** masalah hukum, **keterbukaan informasi publik** dan **Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip (SKKAA)**: Dengan adanya instrumen **SKKAA**, lembaga karsipan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menentukan siapa saja pengguna yang berhak mengakses arsip dengan tingkat kerahasiaan tertentu (seperti terbatas atau rahasia) secara aman.

Melalui pelaksanaan sasaran dan program yang sistematis ini, DPK berharap adanya peningkatan literasi masyarakat dan pengelolaan arsip statis dengan baik yang lebih efektif dan akuntabel. Dampak yang diharapkan adalah Peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui transformasi digital dan pendidikan literasi serta pembudayaan kegemaran membaca masyarakat melalui program-program perpustakaan yang kreatif,

Dan Penguatan tata kelola arsip, peningkatan sumber daya, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi pada Perangkat Daerah dan Lembaga Karsipan Daerah (LKD).

2. Sumber Daya Aparatur

Perkembangan jumlah dan komposisi Pegawai pada DPK Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai menurut golongan

No	Golongan Kepangkatan	Jumlah	Status
1	Golongan IV/b, Pembina Tk.I	5 orang	PNS
2	Golongan IV/a, Pembina	4 orang	PNS
3	Golongan III/d, Penata Tk.I	8 orang	PNS
4	Golongan III/c, Penata	4 orang	PNS
5	Golongan III/b, Penata Muda Tk.I	2 orang	PNS
6	Golongan III/a, Penata Muda	1 orang	PNS
7	Golongan III/a. Penata Muda	6 orang	CPNS
8	Golongan II/c, Pengatur Tk.I	3 orang	CPNS
9	Golongan IX	4 orang	PPPK
10	Golongan V	10 orang	PPPK
Jumlah		47 orang	

Tabel 2. Jumlah Pegawai kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Status
1	Magister (S2)	3 orang	PNS
2	Sarjana (S1)	17 orang	PNS
3	Diploma (D3)	2 orang	PNS
4	Sarjana (S1)	6 orang	CPNS
5	Diploma (D3)	3 orang	CPNS
6	Sarjana (S1)	4 orang	PPPK
7	SMA	12 orang	PPPK
Jumlah		47 orang	

Tabel. 3 Pegawai menurut peta jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Bidang	2 orang
4	Kepala Sub Bagian	2 orang
5	Pustakawan Madya	4 orang
6	Pustakawan Muda	3 orang
7	Pustakawan Pertama	2 orang
8	Arsiparis Muda	4 orang
9	Arsiparis Pertama	4 orang
10	Arsiparis Terampil	2 orang
11	Pranata komputer	2 orang
12	Penelaah Teknis Kebijakan	4 orang
13	Penata Layanan Operasional	3 orang
14	Pengolah Data dan Informasi	4 orang
15	Pengelola Layanan Operasional	1 orang
16	Pengadministrasi Perkantoran	4 orang
Jumlah		47 orang

Tabel 4. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin (Gender)	Jumlah	Status
1	Laki-Laki	7 orang	PNS
2	Perempuan	6 orang	PPPK
		19 orang	PNS
		9 orang	CPNS
		6 orang	PPPK
Jumlah		47 orang	

Berikut adalah analisis dari data tabel pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur untuk Triwulan IV tahun 2025, yang terdiri dari berbagai kategori termasuk status kepegawaian, pendidikan, pangkat dan golongan, serta jenis pejabat:

a. Status Kepegawaian:

- PNS (ASN): Terdapat 26 orang (7 laki-laki dan 19 perempuan).

- CPNS (ASN): Totalnya ada 9 orang (9 perempuan)
- PPPK (ASN): Totalnya ada 12 orang (6 laki-laki dan 6 perempuan).
- Tenaga Upah Jasa: Sebanyak 11 orang, dengan lebih banyak perempuan (7) dibandingkan laki-laki (4).

b. Pendidikan:

- ASN:
 1. Magister (S2): Terdapat 2 orang dengan pendidikan magister.
 2. Sarjana (S1): Sebanyak 29 orang
 3. Diploma III (D3): terdapat 5 orang.
 4. SMA : terdapat 9 orang
- Tenaga Upah Jasa:
 1. SMA/SMK: 8 orang.
 2. SMP : 3 orang

c. Pangkat dan Golongan:

- Pembina Tk.I (IV/a) sampai Golongan V : Beragam distribusi dengan jumlah total pegawai berdasarkan pangkat adalah 47 orang. Penata Tingkat I (III/d) adalah golongan dengan jumlah terbanyak (8 orang).

d. Pejabat Struktural:

- Eselon II hingga Eselon IV: Total ada 6 orang. 3 orang eselon 3 dan 2 orang eselon 4

e. Pejabat Fungsional:

- Ada total 21 orang yang terbagi dalam berbagai keahlian seperti Fungsional Pustakawan madya, muda dan pertama, fungsional arsiparis muda, pertama dan terampil, dan pranata komputer.

f. Pelaksana:

- Total ada 20 pelaksana (8 laki-laki dan 12 perempuan).

Dari analisis ini, terlihat bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak daripada laki-laki di sebagian besar kategori. Juga, ada keberagaman dalam tingkat pendidikan dan golongan yang menunjukkan struktur yang inklusif dan beragam

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah memiliki sarana prasarana yang bersumber dari APBD dan Pemerintah Pusat yaitu PerpusNas sebagai berikut :

Tabel 5. Sarana prasarana yang mendukung kegiatan perpustakaan

Nama/Jenis Barang	Jumlah	Satuan
❖ Mobil Perpustakaan Keliling	3	unit
❖ Motor Baca	1	unit
❖ Wifi	100	Mbps
❖ Komputer PC	16	unit
❖ Printer Card	1	unit
❖ Printer	9	unit
❖ Server	1	unit
❖ Scanner	2	unit
❖ Kamera	1	unit
❖ Koleksi Bahan Bacaan	34.733	Buku
❖ Tabloid luwu timur	60	Eks
❖ Koran yang di langganan	8	judul
❖ Meja baca	8	unit
❖ Kursi baca	48	unit
❖ Rak buku kayu	11	unit
❖ Rak buku besi	3	unit
❖ Lemari kaca/etalase	7	unit
❖ Meja reception	3	unit
❖ AC sentral	4	unit
❖ Kipas angin regency	5	unit
❖ Locker besi / metal	2	unit
❖ Lemari katalog	1	unit
❖ Meja kerja ½ biro	2	unit
❖ Paket software perpustakaan	1	unit
❖ Paket software layanan perpus	1	unit

Tabel 6. Sarana prasarana yang mendukung kegiatan karsipan

Nama/Jenis Barang	Jumlah	Satuan
❖ Mobil sadar arsip	1	unit
❖ Komputer PC	4	unit

❖ Server	1	unit
❖ Paket software SIKPD	1	paket
❖ Printer	3	unit
❖ Depo arsip	6	Unit
❖ Filling cabinet	4	Unit
❖ AC sentral	1	Unit
❖ Meja pengolah arsip	2	Unit
❖ Rak Peta	1	Unit
❖ Rak arsip ordner	6	Unit
❖ Kelembaban suhu	1	Unit
❖ Mesin pencacah kertas	1	Unit
❖ Vacuum cleaner	1	unit

B. ISU STRATEGIS

Sepanjang triwulan IV Tahun 2025, upaya pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) Perpustakaan dan Kearsipan selalu dihadapkan pada permasalahan permasalahan utama (Strategic Issues), diantaranya adalah:

1. Permasalahan Utama dalam pencapaian IKU “ Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan”
 - Belum maksimal promosi minat baca, belum dapat menjangkau seluruh pelosok
 - Belum optimalnya layanan perpustakaan (monil keliling)
 - Terbatasnya SDM perpustakaan
 - Sarana prasarana perpustakaan yang kurang memadai
2. Permasalahan Utama dalam pencapaian IKU “Persentase arsip statis yang terorganisir dengan baik”
 - Belum optimalnya pengelolaan arsip statis sesuai kaidah kearsipan,
 - Sarana prasarana yang masih minim,
 - SDM yang masih kurang

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Triwulan

Untuk tindak lanjut hasil evaluasi triwulan II tahun 2025 Nomor : 700.1.2.2/623/XII/ITKAB tanggal 22 Desember 2025. Dan tindak lanjut evaluasi triwulan III tahun 2025 Nomor: 700.1.2.1/ 655/XII/ITKAB tanggal 29 Desember 2025

Adapun rekomendasi atas hasil evaluasi triwulan II dan III tahun 2025 yang disampaikan sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Memastikan tanggal penetapan disesuaikan dengan renja, dengan tanggal penetapan oleh kepala OPD	Telah dilakukan perbaikan
2.	Agar dokumen RENJA menggambarkan indikator dan target kinerja yang aktual	Telah dilakukan perbaikan indikator dan target kinerja pada dokumen renja
	Membuat definisi operasional pada sasaran kinerja dan indikator kinerja	Telah dibuat definisi operasional pada sasaran kinerja dan indikator kinerja
	Menambahkan IKU arsip dinamis pada indikator sasaran	Telah dilakukan koordinasi dengan bidang arsip, untuk arsip dinamis tidak dimasukkan dalam sasaran IKU karena OPD bisa mengolah arsip dinamisnya sendiri sedangkan arsip statis hanya di LKD.
	Agar pohon kinerja menggambarkan crosscutting antar bidang	Sudah ditindaklanjuti dan tergambar pada aplikasi sipengendali pede
	Menselaraskan antara PK dengan target SKP	Telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan pada unit-unit kerja
	Target kinerja harus tetap konsisten dalam membuat laporan kinerja	Telah dilakukan perbaikan pada laporan kinerja
	Melengkapi dokumen pendukung dalam perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan yang telah dilakukan	Telah disampaikan pada unit-unit kerja agar melengkapi dokumen pendukung
	Menambahkan penjelasan hasil perbaikan/penyempurnaan dalam laporan kinerja yang telah dilakukan	Telah dilakukan perbaikan dengan memberikan penjelasan
	Menselaraskan antara PK dengan target pada SKP kepala OPD	Telah dilakukan perbaikan
	Memastikan IKU telah d formalkan	Telah diformalkan
	Kepala bidang melakukan pemantauan secara berjenjang kepada bawahannya dengan di sertai bukti dukung	Telah disampaikan ke unit-unit kerja dan telah ditindaklanjuti, bukti dukung terlampir pada penilaian mandiri
	ASN atas nama Aristu SE dan Sakkir, S.Kom diwajibkan	Telah disampaikan kepada yang bersangkutan dengan meneruskan wa dari BKPSDM, melalui

	membuat SKP	rapat-rapat internal sebelumnya dan terakhir disampaikan lagi pada rapat internal tgl 12 januari 2026 nomor : 000.1.5/7/DPK
	Memastikan terdapat uraian penjelasan kendala yang dihadapi beserta solusi yang diterapkan	Telah ditindaklanjuti dengan memperbaiki laporan kinerja
	Memastikan terdapat penjelasan mengenai dampak perbaikan terhadap pencapaian sasaran kinerja 1 dan 2	Telah ditindaklanjuti dengan memperbaiki laporan kinerja
	Melampirkan bukti dukung secara lengkap perihal pelaksanaan reviu laporan kinerja/evaluasi internal	Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan bukti dukung berupa notulen,daftar hadir dan dokumentasi
	Menambah penjelasan atau gambaran progress rekomendasi yang telah ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti dengan memberikan Penjelasan sesuai rekomendasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

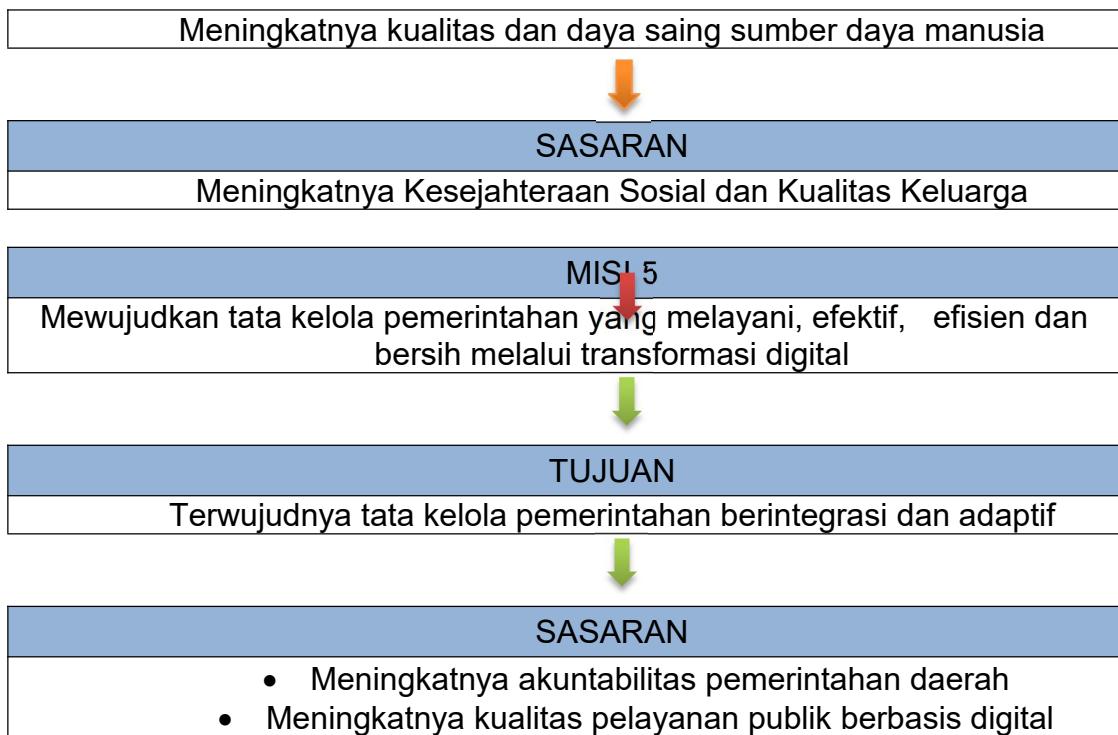
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. RPJMD tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029, Visi Pemerintah Daerah yaitu "Luwu Timur Maju dan Sejahtera". Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dilakukan melalui 5 Misi. Misi-misi yang dimaksud antara lain: Misi Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing, Misi Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, Misi mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan, Misi Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih melalui transformasi digital. Peran DPK terhadap misi dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan 2.1

Tujuan dan Sasaran DPK dalam RPJMD Kab. Luwu Timur 2025 - 2029





DPK sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah, mengemban beberapa misi daerah yakni pada misi ke-1 “ Meningkatkan sumberdaya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing”. Sejalan dengan misi tersebut, dibutuhkan upaya-upaya sesuai dengan tugas dan fungsi DPK.

Misi “Meningkatkan sumberdaya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing” harus didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam hal ini DPK berkontribusi secara langsung upaya bertindak secara transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, DPK mengambil peran penting dalam “Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, sesuai dengan tujuan dalam RPJMD.

Sasaran Strategis “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Keluarga” merupakan penjabaran tujuan Renstra DPK. Makna sasaran ini dalam rangka upaya perangkat daerah dalam peningkatan mutu yang lebih baik dari aspek-aspek seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan dalam peningkatan literasi masyarakat terutama literasi dalam keluarga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi ke-5 “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital” harus didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan yang transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk “Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif sesuai dengan tujuan dalam RPJMD.

“Sasaran strategis” Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital” merupakan penjabaran dari tujuan renstra, makna sasaran ini dalam rangka upaya perangkat daerah dalam peningkatan mutu yang lebih dari baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dengan pelayanan publik berbasis digital, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Transformasi ini mengubah pola komunikasi, mengurangi interaksi tatap muka, contohnya SRIKANDI. Strategi utamanya meliputi pengembangan infrastruktur, literasi digital, keamanan data, dan integrasi data antarinstansi.

Indikator Sasaran DPK terdiri 2 (dua) yaitu : 1). Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan; 2) Persentase arsip statis yang terorganisir dengan baik.

Sebagai penjabaran dari sasaran kinerja strategis yang hendak dicapai telah ditetapkan target dari setiap indikator yang ditetapkan sebagaimana yang ditampilkan pada tabel Perjanjian Kinerja berikut:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2025
1	Meningkatnya Kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Minat Baca Masyarakat	Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	15,45 %
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan arsip statis	Persentase arsip statis yang terorganisir dengan baik	17.3 %

3	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,05
---	---	-----------------------------	-------

Adapun anggaran perubahan yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 5.706.805.479,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.4

Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program pembinaan perpustakaan	539.522.150	APBD
2	Program Pengelolaan Arsip	175.167.150	APBD
3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	24.611.450	APBD
4	Program Perizinan Penggunaan arsip	4.287.600	APBD
5	Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	4.963.217.129	APBD

Tabel 5.

Tujuan dan Sasaran DPK Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	88,05
		Meningkatnya Kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Minat Baca Masyarakat	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	persen	15,45 %
			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	80

	Meningkatnya kualitas Pengelolaan arsip statis	Persentase Arsip Statis yang Terorganisir dengan Baik	persen	17,3 %
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat Daerah	Nilai	70,05

Pada tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki tujuan utama untuk meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip sesuai dengan kaidah kearsipan. Hal ini menunjukkan komitmen DPK dalam meningkatkan jumlah pengunjung, melalui layanan perpustakaan keliling, layanan LaNjut dOng, penambahan koleksi bacaan dan melakukan pembinaan pada pengelola perpustakaan baik sekolah dan desa. Begitupun dengan tata kelola arsip yang baik, pengolahan arsip dilakukan secara sistematis, melakukan pembinaan, pengawasan serta menyusun jadwal retensi dan pemusnahan untuk efisiensi operasional, akuntabilitas dan keamanan informasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, DPK menetapkan beberapa sasaran strategis. Pertama, meningkatnya Kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Minat Baca Masyarakat dengan indikator kinerja tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan. DPK menetapkan target 15,45 % dengan harapan dapat mencapai target. Data yang diperoleh dari jumlah kunjungan perpustakaan sekolah, desa dan layanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dan sasaran strategis yang kedua meningkatnya kualitas Pengelolaan arsip statis, dengan indikator kinerja persentase arsip statis yang terorganisir dengan baik, dengan target 17,3 %. Untuk pengelolaan arsip statis, prosesnya sistematis karena bernilai historis melalui akuisisi, pengolahan, preservasi(perlindungan dari kerusakan) dan pemanfaatan (bisa diakses masyarakat untuk penelitian/pameran). Dan untuk memperoleh arsip statis DPK melakukan penelurusan ke perangkat daerah dan desa. Salah satunya hasil penelusuran arsip statis dari *lembaga adat makole rahampu'u matano*.

Indikator yang ketiga adalah Nilai Akip perangkat daerah ditergetkan 70,05 dimana indikator tersebut digunakan untuk mengukur kinerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, DPK menunjukkan dedikasinya dalam meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip di Kabupaten Luwu Timur dengan menetapkan indikator yang SMART.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumber daya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomenklatur program dan pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara Kapala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Bupati Luwu Timur.

Tabel 6.

Pagu anggaran perubahan DPK tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran Perubahan	Sumber Dana
		%		
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	4.963.217.129	APBD
	Perencana, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100%	70.068.100	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	40.660.400	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	4.350.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	6.574.700	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 laporan	18.483.000	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	3.894.510.403	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang	3.825.642.753	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keunagan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 laporan	68.867.650	APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	15.150.000	APBD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	15.150.000	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100%	38.939.000	APBD
	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang	38.939.000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	212.532.200	APBD
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan gedung kantor	1 paket	12.600.000	APBD

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	20.000.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	9.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 dokumen	8.420.000	APBD
	Fasilitas Kunjungan Tamu	4 laporan	18.900.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	143.612.200	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	339.810.426	APBD
	Pengadaan Mebel	3 unit	43.140.541	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	77.540.000	APBD
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	26 unit	219.129.885	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	277.217.000	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	10.217.000	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	174.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan	93.000.000	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	114.990.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaeaan Perongan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	64.720.000	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain	30 unit	20.250.000	APBD
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	2 unit	30.020.000	APBD
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	74%	371.197.150	APBD
	Pengeloaan Perpustakaan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	100%	325.315.150	APBD
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/ kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	12 perpustakaan	25.595.800	APBD
	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/ Kota	3 layanan	163.806.350	APBD
	Penyusunan data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah kabupaten/Kota	2 dokumen	12.442.250	APBD
	Pengeloaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	400 eksamplar	123.470.750	APBD

	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	100%	45.882.000	APBD
	Pemilihan Duta baca tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	19.770.000	APBD
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	20 perpustakaan	43.679.000	APBD
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	36 orang	104.876.000	APBD
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 lokus	45.882.000	APBD
3	PROGRAM PENGELOAAN ARSIP	100%	175.167.150	APBD
	Pengeloaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	100%	65.112.200	APBD
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	1000 berkas	40.171.800	APBD
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	40 laporan	24.940.400	APBD
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/kota	100%	12.145.750	APBD
	Akuisisi, Pengolahan, Presevasi, dan Akses Arsip Statis	500 arsip	12.145.750	APBD
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Karsipan nasional Tingkat kabupaten/ Kota	100%	97.909.200	APBD
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Karsipan dan daerah kabupaten/ Kota	2 laporan	97.909.200	APBD
4	PROGRAM PERLINDUNGAN PENYELAMATAN ARSIP	100%	24.611.450	APBD
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100%	24.611.450	APBD
	Penilaian Penetapan dan Pelakssanaan Pemusnahan arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 arsip	24.611.450	APBD
5	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNA ARSIP	100%	4.287.600	APBD
	Pelayanan izin pengguna arsip yang bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	100%	4.287.600	APBD
	Penyediaan Daftar dan penetapan izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	10 arsip	4.287.600	APBD
JUMLAH			5.706.805.479	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KINERJA



kuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) didasarkan pada tiga pilar utama:

1. **Perencanaan (Planning)** – Proses ini mencakup penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja, serta Perjanjian Kinerja DPK. Dokumen-dokumen perencanaan ini menjadi acuan utama bagi seluruh aktivitas dan target kinerja yang akan dicapai oleh inspektorat.
2. **Pengorganisasian (Organizing)** – Semua sumber daya dikelola secara optimal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan dan pembinaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah dirancang sebelumnya. Tahap ini menjadi landasan bagi fungsi pelaksanaan (actuating) yang memastikan setiap aktivitas berjalan sebagaimana yang direncanakan.
3. **Evaluasi (Evaluating)** – Pada akhir setiap kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya manajemen pendukung. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur pencapaian kinerja dengan membandingkannya terhadap target yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal. Fungsi evaluasi ini memastikan adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan dan sumber daya yang digunakan.

Pengukuran akuntabilitas ini penting agar kinerja DPK selaras dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan dapat dinilai secara objektif berdasarkan indikator dan kriteria yang telah disepakat

3.1. Capaian Kinerja DPK

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan hasil capaian yang diraih. Indikator-indikator yang

tercantum dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja, menjadi acuan utama dalam menilai capaian kinerja DPK, baik secara triwulan maupun tahunan. Pembandingan ini mengungkapkan selisih kinerja (performance gap), yang kemudian dievaluasi untuk menemukan strategi peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat masing-masing kegiatan sehingga pencapaian indikator program dapat terukur secara objektif. Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Formulasi Perhitungan IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	$\frac{\text{Total kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> Pemustaka: Pengguna yang datang memanfaatkan koleksi, meminjam/mengembalikan buku, menggunakan internet, atau memanfaatkan ruang baca. Total Kunjungan: Angka ril akumulasi kedatangan (satu orang yang datang tiga kali dalam sehari seringkali dihitung tiga kunjungan atau sesuai kebijakan pencatatan perpustakaan). Tujuan Pemanfaatan: Meliputi kegiatan membaca di tempat, peminjaman koleksi, pengembalian koleksi, riset/referensi, penggunaan fasilitas komputer/internet, serta partisipasi dalam acara perpustakaan. 	Bidang Perpustakaan (statistik jumlah pengunjung)
2	Percentase arsip statis yang terorganisir dengan baik	$= \frac{\text{Jumlah Arsip Statis terolah/Terorganisir}}{\text{Total arsip statis}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Arsip Statis Terolah/Terorganisir: Arsip yang sudah melalui tahap akuisisi, preservasi, deskripsi, dan memiliki sarana bantu temu balik (daftar arsip, inventaris, katalog, atau indeks). Total Jumlah Arsip Statis (Akuisisi): Seluruh jumlah arsip statis yang telah diserahkan dari pencipta arsip ke lembaga karsipan (baik yang sudah tertata maupun belum). 	Bidang Arsip (data arsip statis)

Penilaian capaian kinerja menggunakan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan teknis, program, dan kegiatan dengan kriteria berikut:

- 85 ke atas : Sangat Baik
- $70 \leq x < 85$: Baik
- $55 \leq x < 70$: Cukup Baik
- $x < 55$: Kurang Baik

Secara umum, DPK Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran dan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis DPK Kabupaten Luwu Timur 2025-2029. Pencapaian kinerja tahun 2025 telah sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2025.

Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dapat terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, di mana berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja tidak selalu terjawab dalam satu tahun periode pengukuran. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan target atau capaian dalam beberapa tahun atau dengan target hingga akhir tahun 2025. Capaian sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 oleh DPK Kabupaten Luwu Timur terdiri dari satu indikator sasaran yang mencerminkan upaya pencapaian sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran DPK Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 disajikan pada Tabel 7 sedangkan capaian program dan kegiatan berdasarkan target dan realisasi anggaran DPK Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 8

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2025

Analisis Target dan Realisasi Tahun 2025 merupakan tinjauan mendalam terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan realisasinya selama tahun 2025. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, evaluasi ini memperlihatkan sejauh mana target yang telah ditetapkan berhasil tercapai dan bagaimana realitanya sesuai dengan harapan. Memperhatikan peluang-peluang yang dapat dioptimalkan dan tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Untuk menghitung capaian kinerja dapat diukur menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2025

Tujuan	Sasaran Stratergis	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahunan	Target TW IV	Realisasi TW.IV	%/nilai
Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	88,05	88,05		
	Meningkatnya Kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Minat Baca Masyarakat	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	persen	15,45 %	15,45	20,73	134%
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	80	80	80	Sangat Baik
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan arsip statis	Persentase Arsip Statis yang Terorganisir dengan Baik	persen	17,3 %	17,3	25,75	149 %
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat Daerah	Nilai	70,05			

Untuk indikator kinerja utama ke-1 (satu) “*Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan*”, target kinerja adalah 15,45 % atau 50,000 pengunjung, dengan realisasi 20,73 % (67,690 pengunjung). Angka ini diperoleh dari data statistik pengunjung perpustakaan baik perpustakaan umum (layanan anak,umum dan perpuskel), perustakaan sekolah dan perpustakaan desa. Untuk layanan di perpustakaan daerah, DPK membuat inovasi IaNJuT dOng mengantar jemput siswa-siswi yang akan berkunjung ke perpustakaan dalam wilayah kota Malili bekerjasama dengan Dinas Perhubungan.

Perpustakaan Umum dimanfaatkan sebagai outing class oleh beberapa sekolah seperti SDIT Insan Rabbani malili, SDIT. Alfatih Malili, dan Mis Darul Ilmi Hidayatullah Towuti. Selain itu juga untuk meningkatnya literasi/ minat baca masyarakat DPK melaksanakan kegiatan berupa lomba-lomba seperti lomba mewarnai, lomba duta baca, lomba membuat konten, lomba bercerita (story telling). Lomba-lomba ini bisa diikuti mulai dari tingkat PAUD/TK sampai dengan masyarakat. Untuk lomba bercerita merupakan program PERPUSNAS dan tahun 2025, melalui perwakilan dari SD Malaulu membawa perwakilan sulsel ke tingkat Nasional.

Sementara untuk indikator tujuan “**Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM)**” masih menunggu hasil penilaian dari PERPUSNAS.

Adapun perhitungan untuk tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Total kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya}} \times 100\% \\ &= \frac{67.690}{326.591} \times 100\% \\ &= 0,2073 \times 100\% \\ &= 20,73 \% \end{aligned}$$

Adapun faktor yang mempengaruhi target kinerja tercapai meliputi kualitas dan keberagaman koleksi bahan pustaka, kelengkapan sarana prasarana (termasuk internet/Wi-Fi), kualitas layanan pustakawan, serta lokasi strategis dan mudah diakses. Promosi yang gencar, kenyamanan fisik gedung, dan program pendukung seperti pelatihan atau lomba juga meningkatkan jumlah kunjungan

Untuk Indikator Kinerja Utama ke-2 (dua) “*Persentase arsip statis yang terorganisir dengan baik*” dengan target kinerja 17,3% (500 arsip statis) tahun

2025 dan terealisasi 25,75% (829 arsip statis) capaian ini diluar ekspektasi karena mengingat LKD telah melakukan penilaian kembali pada arsip-arsip statis tahun sebelumnya sehingga meletakkan target agak rendah.

Adapun total arsip statis dari tahun 2023-2025 sebanyak 3220 arsip. Untuk memperolah data arsip statis ini, Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) melakukan penelusuran ke Perangkat Daerah, Desa, Ormas/ Lembaga Adat. Untuk mendapatkan realisasi arsip statis 25,75 % dijelaskan pada perhitungan persentase sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Arsip Statis terolah/Terorganisir}}{\text{Total arsip statis}} \times 100\% \\ &= \frac{829}{3220} \times 100\% \\ &= 25,75 \% \end{aligned}$$

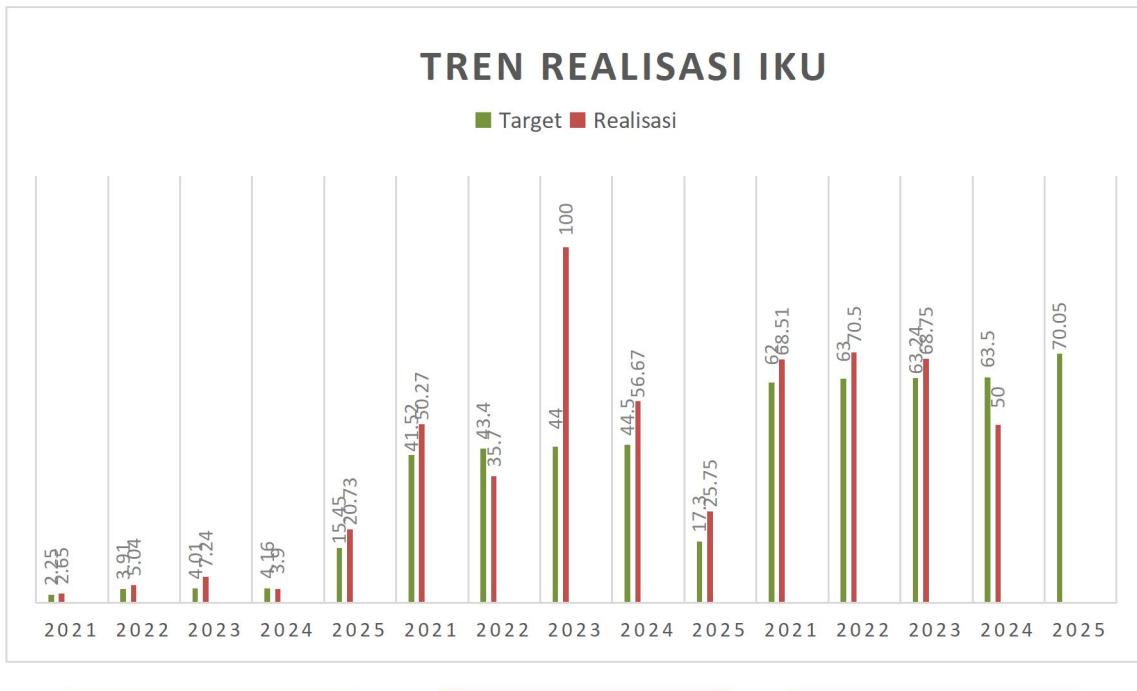
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga capaian kinerja melebihi target sampai dengan triwulan 4 meliputi profesionalisme dan kompetensi arsiparis, ketersediaan sarana/prasarana walaupun masih minim, kelengkapan pedoman akses, serta kondisi fisik arsip. Kecepatan dan akurasi temu kembali (retrieval) bergantung pada sistem klasifikasi, penggunaan teknologi, dan pelestarian arsip dari kerusakan.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2025 DAN TAHUN 2021-2024

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 merupakan tinjauan komparatif terhadap pencapaian target dan realisasi selama empat tahun terakhir, yakni 2021 hingga 2024. Dengan membandingkan data dari tahun-tahun sebelumnya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa mendatang. Adapun target dan realisasi IKU tahun 2021-2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perkembangan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2021-2025

Sasaran strategi	Indikator kinerja	Target (%)					Realiasi Kinerja (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Minat Baca masyarakat	Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	2,25	3,91	4,01	4,16	15,45	2,65	5,04	7,24	3,90	20,73
Meningkatnya kualitas Pengelolaan arsip statis yang terorganisir dengan baik	Pesentase arsip statis yang terorganisir dengan baik	41,52	43,4	44,00	44,5	17,3	50,27	35,7	100	56,67	25,75
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	62,00	63,00	63,25	63,50	70,05	68,51	70,50	68,75	58,00	



Dari tabel 3.3 dan grafik tren diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ada peningkatan pengunjung ke perpustakaan dan namun tahun 2024 terjadi penurunan pengunjung karena padatnya kegiatan

lomba-lomba dengan jumlah SDM yang minim sehingga untuk kegiatan mobil keliling tidak optimal beroperasi.

Tahun 2025 terjadi peningkatan pengunjung ke perpustakaan (umum, sekolah dan desa) peningkatan ini juga di pengaruhi oleh inovasi laNjut dOng yang di gagas oleh bidang Perpustakaan, kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam hal penyediaan transportasi darat (bis sekolah) untuk menjemput anak-anak sekolah untuk berkunjung ke perpustakaan umum dalam wilayah Kota Malili.

Untuk persentase arsip statis terjadi penurunan di tahun 2022 karena dilakukan peninjauan dan penilaian kembali terhadap arsip statis, ini dilakukan oleh arsiparis atau Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) untuk memeriksa, meneliti dan menganalisis ulang apa yang telah dinyatakan sebagai arsip statis (memiliki nilai guna permanen/kesejarahan), dilakukan untuk mencegah penumpukan arsip yang sebenarnya tidak memiliki nilai guna permanen lagi. Kegiatan ini sering dilakukan sebelum proses akuisisi (penyerahan arsip) dari pencipta arsip (perangkat daerah/lembaga adat) ke LKD untuk diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung.

Dan yang tatkala penting Nilai AKIP perangkat daerah, tahun 2024 mengalami penurunan nilai dari target 63,5 terealisasi 58,00 (CC), dari rekomendasi yang diberi akan ditindaklanjuti dengan memperbaiki hal-hal yang dimaksud pada tahun 2025.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir jangka menengah penting untuk mengevaluasi pencapaian organisasi atau proyek terhadap tujuan yang ditetapkan dalam periode waktu yang lebih panjang. Analisis ini memberikan gambaran tentang sejauh mana target tercapai, mengidentifikasi tren kinerja dari waktu ke waktu, serta memungkinkan identifikasi strategi yang efektif dan area yang memerlukan peningkatan. Tujuannya adalah untuk mengukur progres pencapaian tujuan dan menilai kinerja keseluruhan, menungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir jangka menengah dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Akhir Jangka Menengah

Sasaran strategi	Indikator kinerja	Realisasi Kinerja	Target Resntra
		2025	2025
Meningkatnya Kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Minat Baca masyarakat	Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	20,73 %	15,45 %
Meningkatnya kualitas Pengelolaan arsip statis	Pesentase arsip statis yang terorganisir dengan baik	25,75 %	17,3 %
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	-	70,05

Dokumen AKIP perangkat daerah tahun 2025 sementara dalam proses penyusunan sehingga untuk realisasi belum ada.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL

Standar Nasional IKU urusan perpustakaan “ Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) diproyeksikan meningkat mencapai 71,5 atau lebih sejalan dengan target peningkatan diberbagai daerah, yang kini menekankan aktivitas nyata dilapangan dibandingkan aspek administratif. Untuk IKU DPK “ Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan termasuk dalam indikator IPLM. IPLM menjadi indikator tujuan DPK dengan target 80,05 (Nilai) namun untuk hasilnya masih dalam proses penilaian oleh Perpustakaan Nasional RI.

Sedangkan untuk Standar Nasional IKU urusan kearsipan ” Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan dengan target 72,50 (nilai)” target utama pengawasan kearsipan untuk meningkatkan kepatuhan instansi terhadap standar pengelolaan kearsipan (Perka ANRI No.6 Tahun 2019). Untuk DPK Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah merupakan indikator tujuan dengan target 80,00 (nilai) dan realisasi berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian dari Lembaga Arsip Nasional RI (ANRI) DPK Kab. Luwu Timur

memperoleh nilai BB (sangat baik) se-Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Standar nilai yang digunakan sebagai berikut :

- **AA (Sangat Memuaskan):** 90,01 - 100
- **A (Memuaskan):** 80,01 - 90,00
- **BB (Sangat Baik):** 70,01 - 80,00
- **B (Baik):** 60,01 - 70,00
- **CC (Cukup):** 50,01 - 60,00
- **C (Kurang):** 30,01 - 50,00
- **D (Sangat Kurang):** 0 - 30,00

Adapun perbandingannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Tujuan	Sasaran Stratergis	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Kinerja 2025 TW.IV	Standar Nasional
Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	-	71,5
	Meningkatnya Kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Minat Baca Masyarakat	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	persen	20,73	
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	80	72,50
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan arsip statis	Percentase Arsip Statis yang Terorganisir dengan Baik	persen	25,75	
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat Daerah	Nilai		

Dari tabel diatas realisasi kinerja 2025 belum sepenuhnya diselesaikan dimana proses pelaksanaan kegiatan masih sementara berlangsung.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dari tabel 3.3 dan grafik tren diatas terlihat jelas realisasi IKU tahun 2024 hanya 3,90 % untuk tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan dan tahun 2022 realisasi 35,7 % untuk persentase arsip statis yang terorganisir dengan baik. Hal ini sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah

- SDM perpustakaan yang minim

Kondisi ini merujuk pada jumlah tenaga perpustakaan yang kurang dengan kegiatan yang bersamaan sehingga kegiatan rutin seperti mobil layanan keliling tidak beroperasional dengan optimal mengakibatkan kurangnya pengunjung khususnya untuk layanan keliling.

- Dilakukan peninjauan dan penilaian kembali arsip statis

Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dalam hal ini DPK Lutim melakukan peninjauan dan penilaian kembali arsip statis guna memeriksa, meneliti dan menganalisis ulang apa yang telah dinyatakan sebagai arsip statis (memiliki nilai guna permanen/kesejarahan), dilakukan untuk mencegah penumpukan arsip yang sebenarnya tidak memiliki nilai guna permanen lagi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja diantaranya:

1. Komitmen pemerintah dalam peningkatan literasi masyarakat;
2. Dukungan perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan pengunjung ke perpustakaan;
3. SDM perpustakaan yang inovatif dan kreatif;
4. Sarana prasarana yang memadai dan koleksi buku yang relevan/ up to date.
5. Selain itu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dengan kualitas layanan yang baik untuk kepuasan pemustaka.
6. Komitmen pemerintah dalam penerapan pelaksanaan arsip secara digital (srikandi);
7. Dukungan perangkat daerah dalam mengelolah arsip sesuai standar;
8. SDM arsiparis yang terlatih dan memiliki skill;
9. Sarana prasarana yang memenuhi standar seperti filling cabinet.
10. Melakukan audit/pengawasan kearsipan secara berkala.

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian diantaranya :

- Dari pembinaan perpustakaan desa dan sekolah setelah di monev masih ada yang belum mengalami perubahan dan ini menjadi catatan untuk bidang perpustakaan khususnya pustakawan.
- Terkait pembinaan kearsipan masih ada beberapa perangkat daerah yang belum mengolah arsipnya sesuai standar kearsipan. Begitupun dengan desa, setelah dilakukan monev masih banyak yang belum tertata sesuai standar dan salah satu penyebabnya adalah pengelolah baru dan ini menjadi catatan untuk bidang kearsipan khususnya arsiparis untuk menindaklajuti kembali.

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan diantaranya:

- Perlu melakukan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan dan pengelola kearsipan

D. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), perlu adanya Program dan kegiatan yang disusun dalam bentuk rencana aksi pencapaian PK. Adapun program dan kegiatan yang mendukung realisasi pencapaian Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

$$= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

Tabel 3.6
Program yang mendukung Pencapaian PK Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemustaka
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	Persentase pembudayaan gemar membaca

			Kabupaten/Kota	
2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah dan desa
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang dikelola
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi karsipan
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase arsip perangkat daerah yang dimusnahkan
4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase perizinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah
			Administrasi Keuangan	Persentase realisasi

			Perangkat Daerah	anggaran
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset teradministrasi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar
			Persentase layanan administrasi tepat waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang dipelihara secara berkala

Indikator kinerja “ Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan ” didukung oleh kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan pembudayaan gemar membaca. Sementara indikator kinerja “persentase arsip statis yang terorganisir dengan baik” didukung oleh Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian sasaran indikator dan indikator kinerja utama tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya manusia dengan jumlah ASN dan Upahjasa berjumlah 57 orang personil (PNS 24 orang, CPNS 9 orang, PPPK 14 orang dan Upah jasa 10 orang) kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal. Adapun untuk penggunaan sumber daya DPK tahun 2025 seperti realisasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran DPK Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025

NO	PROGRAM/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.502.739,279	4.891.856,941	88,90	610.882,338	11,10	610.882,338	11,10
05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.963.217,129	4.426.534,748	89,19	536.682,381	10,81	536.682,381	10,81
01	Perencana, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	70.068,100	68.469,018	97,72	1.599.082	2,28	1.599.082	2,28
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.660.400	40.385.466	99,32	274.934	0,68	274.934	0,68
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.350.000	4.089.379	94,01	260.621	0,00	260.621	5,99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.574.700	5.956.665	90,60	618.035	9,40	618.035	9,40
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.483.000	18.037.508	97,59	445.492	2,41	445.492	2,41
02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	3.894.510,403	3.429.208,142	88,05	465.302,261	11,95	465.302,261	11,95
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.825.642,753	3.374.458,936	88,21	451.183,817	11,79	451.183,817	11,79
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	68.867,650	54.749.206	79,50	14.118.444	20,50	14.118.444	20,50
03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	15.150.000	13.377.721	88,30	1.772.279	11,70	1.772.279	11,70
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	15.150.000	13.377.721	88,30	1.772.279	11,70	1.772.279	11,70
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	38.939.000	38.839.000	100	100.000	0,26	100.000	0,26
	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38.939.000	38.839.000	99,74	100.000	0,26	100.000	0,26
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.532.200	198.660.075	93,47	13.872.125	6,53	13.872.125	6,53
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan gedung kantor	12.600.000	12.595.974	99,97	4.026	0,03	4.026	0,03
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	19.996.675	99,98	3.325	0,02	3.325	0,02
	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	9.000.000	4.395.320	48,84	4.604.680	51,16	4.604.680	51,16

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.420.000	8.345.000	99,11	75.000	0,89	75.000	0,89
	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.900.000	18.275.000	96,69	625.000	3,31	625.000	3,31
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.612.200	135.052.106	94,04	8.560.094	5,96	8.560.094	5,96
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	339.810.426	335.131.182	98,62	4.679.244	1,38	4.679.244	1,38
	Pengadaan Mebel	43.140.541	43.021.541	99,72	119.000	0,28	119.000	0,28
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	77.540.000	74.471.400	96,04	3.068.600	3,96	3.068.600	3,96
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	219.129.885	217.638.241	99,32	1.491.644	0,68	1.491.644	0,68
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	277.217.000	242.459.040	87,46	34.757.960	12,54	34.757.960	12,54
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.217.000	8.382.699	82,05	1.834.301	17,95	1.834.301	17,95
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	174.000.000	141.076.341	81,08	32.923.659	18,92	32.923.659	18,92
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.000.000	93.000.000	100,00	-	0,00	-	0,00
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.990.000	100.390.570	87,30	14.599.430	12,70	14.599.430	12,70
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaeaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.720.000	53.343.162	82,42	11.376.838	17,58	11.376.838	17,58
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain	20.250.000	17.170.075	84,79	3.079.925	15,21	3.079.925	15,21
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	30.020.000	29.877.333	99,52	142.667	0,48	142.667	0,48
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	539.522.150	465.322.193	86,25	74.199.957	13,75	74.199.957	13,75
09	Pengeloaan Perpustakaan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	325.315.150	276.732.765	85,07	48.582.385	14,93	48.582.385	14,93
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/ kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25.595.800	22.195.288	86,71	3.400.512	13,29	3.400.512	13,29
	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/ Kota	163.806.350	121.428.980	74,13	42.377.370	25,87	42.377.370	25,87
	Pengeloaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	123.470.750	121.387.253	98,31	2.083.497	1,69	2.083.497	1,69
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	12.442.250	11.721.244	94,21	721.006	5,79	721.006	5,79
10	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	214.207.000	188.589.428	88,04	25.617.572	11,96	25.617.572	11,96
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	45.882.000	32.763.673	71,41	13.118.327	28,59	13.118.327	28,59
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	104.876.000	96.987.372	92,48	7.888.628	7,52	7.888.628	7,52
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	43.679.000	40.482.383	92,68	3.196.617	7,32	3.196.617	7,32

	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah kabupaten/ Kota	19.770.000	18.356.000	92,85	1.414.000	0,00	1.414.000	7,15
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	204.066.200	185.298.153	90,80	18.768.047	9,20	18.768.047	9,20
	PROGRAM PENGELOAAN ARSIP	175.167.150	161.694.118	92,31	13.473.032	7,69	13.473.032	7,69
11	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	65.112.200	58.629.012	90,04	6.483.188	9,96	6.483.188	9,96
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	40.171.800	36.948.216	91,98	3.223.584	8,02	3.223.584	8,02
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenagan Kabupaten/ Kota	24.940.400	21.680.796	86,93	3.259.604	13,07	3.259.604	13,07
12	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	12.145.750	11.246.304	92,59	899.446	7,41	899.446	7,41
	Akuisisi, Pengolahan, Presevasi, dan Akses Arsip Statis	12.145.750	11.246.304	92,59	899.446	7,41	899.446	7,41
13	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan nasional Tingkat kabupaten/ Kota	97.909.200	91.818.802	93,78	6.090.398	6,22	6.090.398	6,22
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan daerah kabupaten/ Kota	97.909.200	91.818.802	93,78	6.090.398	6,22	6.090.398	6,22
	PROGRAM PERLINDUNGAN PENYELAMATAN ARSIP	24.611.450	19.957.825	81,09	4.653.625	18,91	4.653.625	18,91
14	Pemusnahan Arsip Dilengkung Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	24.611.450	19.957.825	81,09	4.653.625	18,91	4.653.625	18,91
	Penilaian, Penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	24.611.450	19.957.825	81,09	4.653.625	18,91	4.653.625	18,91
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	4.287.600	3.646.210	85,04	641.390	14,96	641.390	14,96
15	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di kabupaten/ Kota	4.287.600	3.646.210	85,04	641.390	14,96	641.390	14,96
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	4.287.600	3.646.210	85,04	641.390	14,96	641.390	14,96
TOTAL BELANJA LANGSUNG		5.706.805.479	5.077.155.094	88,97	629.650.385	11,03	629.650.385	11,03
TOTAL BELANJA		5.706.805.479	5.077.155.094	88,97	629.650.385	11,03	629.650.385	11,03

Tabel 3.8 diatas menggambarkan realisasi anggaran DPK sampai dengan triwulan IV Tahun 2025. Data ini memberikan rincian alokasi anggaran untuk berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan DPK serta persentase realisasinya. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp. 5.706.805.497,- dengan total realisasi sebesar Rp. 5.077.155.094,- yang menunjukkan tingkat realisasi sebesar 88,97%.

Program dan kegiatan yang terdapat dalam tabel ini meliputi berbagai aspek, seperti program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota realisasi anggaran sebesar 89,19 %, Program pembinaan perpustakaan realisasi anggaran sebesar 86,25%, Program pengelolaan arsip realisasi anggaran sebesar 92,31%,

Program perlindungan penyelamatan arsip dengan realisasi sebesar 81,09%, dan Program perizinan penggunaan arsip realisasi sebesar 85,04%.

Berdasarkan tabel diatas realisasi keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Triwulan IV sebesar 88,97% dengan kategori “Tinggi” , ada beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya realisasi keuangan diantaranya adalah :

- Anggaran yang sifatnya disiapkan seperti belanja pegawai
- Anggaran yang selisih/sisa pagu dari Proses belanja melalui E-Catalog

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2025 sekaligus alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah.

Penyusunan laporan ini memerlukan kajian analisis yang komprehensif, mencakup hubungan antara kemampuan sumber daya manusia dan faktor-faktor sumber daya lainnya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain :

- Keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan terbatas
- Keterlambatan pencairan dana merupakan salah satu kendala yang dapat memengaruhi pelaksanaan program.

C. Rekomendasi langkah perbaikan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi hingga triwulan IV tahun 2025, beberapa langkah perbaikan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan sistem perencanaan dan pengendalian kinerja serta anggaran untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.
2. Melakukan evaluasi rutin terhadap target kinerja triwulan pada setiap subkegiatan, agar target tersebut dapat tercapai sesuai jadwal dan tidak bergeser ke triwulan berikutnya.
3. Merasionalisasi penetapan anggaran kas pada triwulan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Melaksanakan koordinasi intensif melalui monitoring dan evaluasi bulanan dengan seluruh pejabat dan staf terkait, guna mempercepat daya serap anggaran dan memastikan pencapaian target subkegiatan.

5. Memaksimalkan evaluasi kinerja internal secara berjenjang dan berkualitas dengan dukungan sumber daya yang memadai.

Penyusunan dokumen ini adalah wujud nyata dari komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan memahami berbagai tantangan yang ada dan mengidentifikasi solusi yang strategis, diharapkan laporan ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang. Lebih dari sekadar dokumen pertanggungjawaban, laporan ini merupakan refleksi atas kerja keras, dedikasi, dan sinergi dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang memberikan arah yang lebih jelas bagi peningkatan kinerja organisasi serta menjadi pendorong dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Demikian terselesainya laporan ini, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya yang dilakukan menjadi inspirasi bagi langkah-langkah perbaikan di masa depan.

Malili, 6 Februari 2026

Kepala Dinas,



DOKUMENTASI TRIWULAN IV
BID. KEARSIPAN
Kegiatan Pengolahan Arsip Dinamis





Kegiatan pemeliharaan depot arsip





Kegiatan Pembinaan Arsip



Organisasi Kemasyarakatan POMPESI LUWU



Organisasi Kemasyarakatan Mokole Dumpelo Pamona



Organisasi Politik PDIP



Organisasi Politik Partai Nasdem

Bimbingan Konsultasi Kearsipan





Kegiatan Pemusnahan Arsip







Penyerahan Hadiah Lomaba Tertib Arsip





Rapat Staf Bidang Kearsipan





RAPAT DENGAN OPD DAN KECAMATAN
TERKAIT PERSIAPAN LOMBA TERTIB ARSIP





UNDANGAN SENSI KEARSIPAN
SHARING SESSION KEARSIPAN



DOKUMENTASI KEGIATAN

Pelayanan Perpustakaan



Pemilihan Duta Baca dan Literasi



Pelayanan Perpustakaan

Lavanan Umum



Lavanan Ibu dan



Literasi Berbasis Inklusi sosial





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Mallili 92981 Sulawesi Selatan
Email: perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

Mallili, 09 Januari 2026

Nomor : 000.1.5/7/DPK
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat

Yth. 1. Sekretaris
2. Para Kabid
3. Para Pejabat Es. 4
4. Para Pejabat Fungsional
5. Staf ASN dan Non-ASN
Masing-masing
di -
Tempat

Dalam rangka menghadapi persiapan Tahun Anggaran 2026 dan Evaluasi Kinerja 2025, maka dengan ini dianggap perlu untuk melakukan rapat staf dalam lingkup Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

Berkaitan hal di atas, dengan ini diharap menghadiri Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Waktu : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Seminar, Gedung Layanan Perpustakaan Daerah

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800112 200604 1 016

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Mallili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Mallili;
3. Ketua DRPD Kab. Luwu Timur di Mallili;
4. Inspektor Kab. Luwu Timur di Mallili.

Notulen Rapat Internal Persiapan Tahun Anggaran 2026 dan Evaluasi Kinerja Tahun 2025

Waktu dan Tempat :

- Hari/Tanggal: Senin, 12 Januari 2026
- Waktu: 09.00 Wita
- Tempat: Ruang Seminar, Gedung Layanan Perpustakaan Umum

Peserta Rapat :

- Kepala Dinas
- Sekretaris Dinas
- Kepala Bidang Perpustakaan
- Kepala Bidang Karsipan
- Para Pejabat Es.4
- Para Pejabat Fungsional
- Staf ASN dan Non-ASN

Agenda Rapat :

1. Persiapan menghadapi Tahun Anggaran 2026
2. Evaluasi kinerja Tahun 2025
3. Rencana tindak lanjut dan strategi peningkatan kinerja

Jalannya Rapat

1. Pembukaan

- Rapat dibuka oleh Kepala Dinas dengan penekanan pentingnya persiapan anggaran 2026 serta evaluasi capaian kinerja tahun 2025.

2. Evaluasi Kinerja Tahun 2025

Sekretaris Dinas menyampaikan laporan capaian SKP pegawai:

Sebagian besar pegawai mencapai target SKP dengan kategori baik. namun terdapat beberapa pegawai yang belum memenuhi target karena kurangnya perhatian terhadap tugas yang diberikan.

Kepala Bidang Perpustakaan menyoroti peningkatan layanan digital, namun masih perlu penguatan literasi digital masyarakat. Dalam rangka meningkatkan jumlah layanan perpustakaan serta mempersiapkan pelaksanaan perlombaan akreditasi perpustakaan pada tahun 2027, diperlukan langkah strategis berupa penguatan kualitas layanan, penambahan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kepala Bidang Karsipan menambahkan agar penambahan anggaran bimtek terkait karsipan untuk meningkatkan SDM. menekankan perlunya sistem pengelolaan arsip elektronik yang lebih terintegrasi serta untuk meningkatkan kualitas tata kelola karsipan, diperlukan penguatan kinerja monitoring dan evaluasi secara

berkesinambungan. Monitoring dilaksanakan guna memastikan setiap kegiatan pembinaan karsipan berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta capaian hasil pembinaan.

3. Persiapan Tahun Anggaran 2026

memaparkan rancangan anggaran 2026, Fokus pada peningkatan layanan perpustakaan,,agar meningkatkan kinerja pembinaan karsipan, diperlukan upaya penguatan yang terarah agar selaras dengan hasil monitoring dan evaluasi karsipan. Langkah tersebut mencakup penyesuaian program pembinaan berdasarkan temuan evaluasi, penerapan standar pengelolaan arsip yang konsisten, serta pengawasan berkelanjutan guna memastikan tercapainya tujuan pembinaan secara efektif dan akuntabel." Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan.

Hasil Keputusan Rapat :

- Menyusun rencana kerja detail per bidang untuk tahun 2026.
- Melakukan pelatihan pegawai untuk peningkatan SDM
- Penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis
- Melaporakan rencana sasaran kinerja pegawai setiap awal bulan, sebagai acuan untuk pelaksanaan kinerja dalam sebulan.

Penutup :

Rapat ditutup pukul 11.33 WITA oleh Kepala Dinas dengan harapan seluruh pegawai dapat meningkatkan kinerja dan beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi.

Demikian Notulen Rapat Internal Persiapan Tahun Anggaran 2026 dan Evaluasi Kinerja Tahun 2025

Notulis,



FITRI AMELIA

Dokumentasi :

